

ABSTRAK

Desentralisasi fiskal memberikan banyak keuntungan bagi daerah untuk mengatur sendiri kapasitas fiskalnya. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk meningkatkan perekonomiannya secara efisien karena pemerintah telah memberikan pengetahuan bermanfaat dalam pengalokasian sumber daya yang ada. Pemerintah dapat dengan baik memberikan barang publik dan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pendapatan di 6 Provinsi Pulau Jawa selama kurun waktu tujuh tahun periode pelaksanaan yaitu dari tahun 2014 – 2020. Variabel yang diteliti terdiri dari derajat desentralisasi fiskal, jumlah tenaga kerja, rasio pajak daerah, dan keterbukaan perdagangan dengan menggunakan persamaan *fixed effect model (FEM)*.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa secara simultan semua variabel independen mempengaruhi secara signifikan dalam mengurangi tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah di Pulau Jawa. Apabila dilihat berdasarkan uji parsial, dapat diketahui variabel desentralisasi fiskal, tenaga kerja, dan rasio pajak daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa, sedangkan variabel keterbukaan perdagangan memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar Provinsi di Pulau Jawa.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Desentralisasi Fiskal, Tenaga Kerja, Pajak Daerah, Keterbukaan Perdagangan